

IDENTITAS-IDENTITAS ETNIK DAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Oleh

Helius Sjamsuddin

“Unity without diversity results in cultural repression and hegemony. Diversity without unity leads to Balkanization and the fracturing of the nation-state. Diversity and unity should coexist in a delicate balance in a democratic multicultural nation-state.” (James A. Banks, “Educating Global Citizens in a Diverse World.”) (<http://www.newhorizons.org>).

1. Pengantar

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang “bangsa”nya dipercayai adalah serumpun (*stock*) akan tetapi karena pengalaman kolektif sejarah di masa kolonial yang berlainan, setelah berakhir Perang Dunia II, muncul masing-masing sebagai dua negara-bangsa (*nation-states*) yang berbeda ketika memasuki era modern. Jika Malaysia wilayah geografis utamanya jazirah (*peninsula*), Indonesia wilayah geografisnya kepulauan (*archipelago*). Tetapi baik Indonesia maupun Malaysia berbagi sama (*share*) wilayah di pulau Kalimantan (Borneo).

Meskipun sebagai negara-bangsa yang telah berbeda, masing-masing Indonesia dan Malaysia mempunyai kesamaan lain yaitu rakyatnya merupakan mosaik segala etnik dengan keragaman kultural yang besar, sejumlah banyak bahasa dan dialek, dan memeluk beberapa agama besar. Selain daripada itu Indonesia dan Malaysia kebetulan masing-masing penduduknya mayoritas Islam dan kedua-duanya terbilang sedang dalam proses menjalani demokrasi. (Blij & Muller, 2004: 488-491).

Saya di sini tidak membicarakan tentang Malaysia lebih lanjut melainkan hanya kasus Indonesia. Dalam hal ini pendekatan saya lebih kepada pengalaman sejarah dan ilmu-ilmu sosial lain. Hanya sebelumnya saya ingin membahas lebih dulu dua pasang konsep majemuk, *identitas etnik* dan *identitas nasional* yang secara teoritis dan praktis masih menyimpan sejumlah masalah, disela contoh-

contoh beberapa perspektif dinamika hubungan antar kedua konsep itu dalam kerangka kemungkinannya untuk pendidikan.

2. Identitas Etnik


Sebenarnya konsep identitas etnik masih menyisakan debat yang belum usai, terutama di kalangan pakar-pakar ilmu-ilmu sosial. Meskipun demikian setidaknya kita perlu mendapat gambaran umum tentang konstruk ini. Ada yang berpendapat bahwa pengertian identitas etnik ini menunjukkan kepada seseorang yang mengidentifikasi dirinya pada satu kelompok etnik tertentu, rasa memiliki kelompok etnik itu dan merupakan bagian dari pikiran, persepsi, perasaan dan tingkah lakunya karena ia menjadi anggota dari kelompok etnik itu. Identitas etnik terpisah dari identitas pribadi selaku individu, meskipun keduanya saling mempengaruhi satu sama lain.

Ada empat komponen utama identitas etnik:

- Kesadaran etnik (*ethnic awareness*), seseorang menyadari memiliki etnik sendiri yang berbeda dengan kelompok lain;
- Identifikasi-diri etnik (*ethnic self-identification*), label yang diberikan pada kelompoknya sendiri;
- Sikap etnik (*ethnic attitudes*), perasaan tentang dirinya dan kelompok lain;
- Tingkah laku etnik (*ethnic behaviors*), pola-pola tingkah laku yang khas ada pada suatu kelompok etnik tertentu.

http://www.uky.edu/Classes/FAM/357/fam544/ethnic_identity.htm

Istilah *Identitas (Identity)* adalah sebuah konsep generik yang dapat dihubungkan dengan disiplin-disiplin lain seperti filsafat, sosiologi, antropologi, psikologi dll. Dikaitkan dengan konsep majemuk *identitas etnik (ethnic identity)*, istilah ini dapat diperiksa melalui asal-usul etimologisnya. Istilah *ethnic* berasal dari kata Yunani dan Latin y.i. *ethnikas* dan *ethnicus* yang kedua-duanya berarti “bangsa” (*nation*). Menurut sejarahnya pernah digunakan untuk merujuk kepada orang-orang yang kepercayaannya masih “pagan” (*heathens*). *Ethos*, dalam bahasa Yunani artinya adat-kebiasaan (*custom*), watak (*disposition*) atau sifat

(*trait*). Jadi jika digabung kata-kata *ethnikas* dan *ethos* dapat berarti “sekumpulan orang (*nation*) yang hidup bersama yang mempunyai dan mengakui adat-istiadat yang sama.” ( http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_group; http://www.ac.wvu.edu/~trimble/ethnicity_identity.htm).

Bagian kedua dari konsep itu, identitas (*identity*), berasal dari bahasa Latin yang diambil dari kata *identitas* [sic!] yang terbentuk dari kata *idem* yang artinya sama (*same*). Simpson & Weiner sebagaimana dikutip oleh Trimble & Dickson menjelaskan bahwa istilah itu digunakan untuk menyatakan “gagasan kesamaan, keserupaan, dan kesatuan.” Lebih tepat lagi, identitas berarti, “kesamaan dari seseorang atau hal-hal sepanjang waktu dalam semua keadaan; kondisi atau fakta bahwa seseorang atau hal adalah dirinya dan bukan yang lain.” (Simpson & Weiner, 1989: 620; http://www.ac.wvu.edu/~trimble/ethnicity_identity.htm).

Dengan menggabungkan kedua definisi dan penafsiran-penafsiran dari kata identitas dan etnisitas itu, dapat disimpulkan bahwa mereka mempunyai arti, atau paling tidak mengimplikasikan, “kesamaan dari sekelompok atau bangsa yang mempunyai adat-istiadat, tradisi-tradisi, pengalaman-pengalaman sejarah, dan dalam beberapa hal kediaman secara geografis sama.” Pada level pertama penafsiran gabungan definisi itu cukup untuk menangkap cara identitas itu umumnya dikonsepsualisasikan dan digunakan untuk memahami pengaruh-pengaruh etnokultural pada pembentukan dan perkembangannya. Pada level lain identitas hampir sinonim dengan etnisitas (*ethnicity*) (Trimble & Dickson, (http://www.ac.wvu.edu/~trimble/ethnicity_identity.htm)).

Di Indonesia, identitas etnik seseorang jelas jika ia berasal dari ibu dan bapak etnik yang sama, berdiam di sebuah wilayah tertentu yang memang turun-temuruan berdiam di situ, menggunakan bahasa daerah tertentu, beserta segala atribut-atribut budaya yang memang diakui menjadi miliknya dan diakui pula secara implisit atau eksplisit oleh etnik lain. Katakan, sebagai contoh, etnik Madura, mereka berdiam di Madura, menggunakan bahasa Madura. Ketika mereka pindah ke Jawa, misalnya ke Jember, mereka oleh etnik Jawa diakui tetap diakui sebagai orang Madura, walaupun lambat-laun setelah berbaur lama ia juga dapat berbahasa Jawa. Lain halnya kalau kemudian keturunan-

keturunannya menikah dengan etnik Jawa, kategori bagi keturunannya menjadi lain.

Pendapat lain, menurut Yuet Cheung, yang merupakan kekhasan identitas etnik adalah sebagai sebuah gagasan afiliatif (*affiliative construct*) di mana seorang individu dipandang oleh mereka sendiri dan oleh orang lain termasuk pada satu etnik atau kelompok kultural tertentu. Satu individu dapat memilih untuk mengasosiasikan dirinya dengan satu kelompok terutama jika ada pilihan lain (misalnya seseorang adalah dari etnik campuran atau keturunan ras campuran). Afiliasi itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ras, kelahiran, dan lambang (Cheung, 1993).

Dalam kawin campur antara dua etnik yang berbeda, anak-anak dari keduanya akan memilih berafiliasi kepada etnik yang mana. Misalnya lelaki etnik Bugis, menikah dengan perempuan etnik Sunda, bermukim di Tasikmalaya, anak-anak mereka menjadi “separuh Bugis-separuh Sunda.” Anak-anaknya bebas memilih berafiliasi ke mana, mungkin ke Sunda jika ia masih tetap tinggal di Tasikmalaya atau di wilayah-wilayah geografis dikenal sebagai tanah “Pasundan.” Tetapi umumnya anak-anak yang sudah menjadi “Indonesia” ini jarang mempermasalahkan identitas etniknya lagi, kecuali untuk mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk). Itu pun mereka bebas memilih, etnik ayahnya, atau etnik ibunya.

Faktor-faktor rasial termasuk penggunaan ciri-ciri fisiognomik dan fisik, faktor kelahiran merujuk tempat kelahiran atau asal dari individu-individu, orang tua dan kerabatnya, dan faktor-faktor simbolik termasuk faktor-faktor yang menjadi perlambang atau contoh dari satu kelompok etnik (misalnya, hari-hari libur, makanan, pakaian, perkakas, dll). Cheung mendefinisikan identifikasi diri sebagai keterikatan psikologis pada satu kelompok etnik atau warisan dan oleh sebab itu konsepsinya berpusat pada persepsi-diri (Cheung, 1993: 1216).

Sosiolog Sawiti Suharso memasukkan dalam definisinya proses-proses sosial termasuk seseorang dalam memilih teman-teman, memilih teman hidup untuk masa akan datang, persepsi tentang kesempatan-hidup, dan reaksi-reaksi yang lain dalam lingkungan sosial seseorang. Definisi Suharso ini sejalan dengan definisi Fredrik Bart (1969) yang berpendapat bahwa identitas etnik adalah salah

satu cara untuk menciptakan batas-batas yang memungkinkan satu kelompok membuat jarak mereka sendiri satu dengan yang lain. (Sollars, 1996: xxii).

Psikolog Jean Phinney mengakui ketidaksamaan definisi-definisi tentang identitas etnik membuat generalisasi dan perbandingan lintas kajian sulit dan mendua. Oleh sebab itu menurutnya definisi itu merupakan konsep psikologis, bahwa "identitas etnik adalah suatu konstruk dinamis, multidimensional yang merujuk kepada identitas diri, atau ia merasa diri sebagai anggota dari satu kelompok etnik tertentu." (Phinney, 2003: 63). Menurut pandangannya seseorang mengklaim suatu identitas dalam konteks satu sub-kelompok mempunyai kesamaan keturunan dan memiliki bersama satu kebudayaan yang sama, ras, agama, bahasa, kekerabatan, atau tempat asal-usul. Selanjutnya ia menambahkan bahwa "identitas etnik bukanlah satu yang sudah pasti (*fixed*) melainkan cair (*fluid*) dan pemahaman dinamis tentang diri dan latar belakang etnik. Identitas diri itu dikonstruksi dan dimodifikasi ketika individu-individu menyadari etnisitas mereka, dengan *setting* sosiokultural yang luas." (Phinney, 2003: 63).

Pendapat Phinney ini sejalan dengan pendapat psikolog lintas-budaya Peter Weinreich (1986) yang berpendapat bahwa identitas diri etnik bukan suatu proses yang statis melainkan sesuatu yang dapat berubah dan beragam menurut konteks-konteks sosial tertentu. Misalnya, individu-individu dapat menghindari situasi-situasi di mana identitas mereka tertantang, terancam, terhina, dan dihukum. (Weinreich & Saunderson, 2003). Misalnya seseorang dari etnik A, ia berada di tengah-tengah etnik B yang tidak begitu "simpati" pada etnik A, maka untuk "menyelamatkan diri" ia merahasiakan asal-usul etniknya. Perlindungan ini tidak ada artinya jika ia menggunakan nama "label" keluarga atau ketahuan dialek khas etnik A, misalnya. Etnik Cina, sulit menyembunyikan diri jika matanya masih sipit. Atau sejumlah etnik-etnik di Indonesia yang sulit menyembunyikan diri dari label-label namanya, atau dari dialek bahasa daerah yang masih "kental" meskipun ia lancar sekali berbahasa Indonesia.

Identitas etnik biasanya kontekstual dan situasional karena ia berasal dari negosiasi-negosiasi sosial di mana seseorang menyatakan suatu identitas etnik dan kemudian mendemonstrasikan diterima dan diakui oleh penilai-penilai

kelompok etnik kepada yang lain. Deklarasi atau pengakuan etnik seseorang acapkali terbuka untuk diteliti cermat oleh yang lain-lain yang dapat mendukung atau menolak pernyataannya itu.

Ini ada hubungannya dengan perkawinan antar-etnik di beberapa daerah tertentu di Indonesia. Katakan, seorang pemuda dari etnik Jawa, misalnya mau menikah dengan gadis dari salah satu etnik Batak. Si pemuda harus menyatakan kesediaannya untuk menjadi salah satu anggota dari marga Batak tertentu yang bukan marga si gadis setelah melalui seleksi dari penilai adat. Seremoninya tentu saja dengan segala upacara adat yang dilazimkan, sambutan dan pidato-pidato bahasa daerah. Setelah identitas etniknya jelas dengan menggunakan nama marga, baru seremoni perkawinan dilaksanakan. Upacara khusus ini adalah contoh utama etnik situasional atau identitas etnik situasional. Biasanya perkawinan adat antar-etnik itu berlangsung jika jika kedua belah pihak berasal dari orang-orang terpandang karena untuk melaksanakan segala macam upacara biayanya juga cukup besar.

Pada tingkat individual atau level sosial orang dapat bersandar pada nama-nama (*labels*) untuk menunjukkan afiliasi etnik mereka dan selanjutnya identitas mereka. Nama-nama membantu mengklasifikasi dan penanda orang. Jadi nama etnik mempunyai nilai dan fungsi sosial politik. (Trimble, 2000). (http://www.ac.wvu.edu/~trimble/ethnicity_identity.htm) Di Indonesia nama-nama orang dapat ditentukan dari mana ia (mereka) berasal dan acapkali memudahkan secara sosial ia (mereka) berintra-aksi, terutama jika menyangkut lapangan kerja. Begitu juga dalam bidang politik—pada level nasional pun—nama-nama dan identitas etnik seseorang juga mempunyai pengaruh. Dalam pemilihan umum untuk mendapatkan suara, misalnya, bagi calon kepala daerah dari tingkat pusat sampai tingkat lokal, identitas etnik calon akan menjadi daya tarik bagi pemilih yang etniknya sama, terutama dari pemilih “akar rumput” (*grass roots*).

Istilah-istilah kelompok-kelompok etnik dan etnisitas digunakan pertama kali dalam antropologi untuk menunjukkan kepada orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan kelompok kultural yang sama dan yang memiliki kesamaan adat-istiadat, bahasa dan tradisi-tradisi. Selama bertahun-tahun konsep itu

tampaknya muncul melalui suatu kombinasi antara etnik dan identitas dan makna-makna mereka tanpa mengetahui siapa yang memberi istilah atau definisi yang seringkali dikutip itu. Begitu pula istilah-istilah ras dan etnisitas acapkali dipertukarkan pemakaiannya dalam merujuk kepada karakteristik-karakteristik fisik dan kultural dari individu sebagai anggota dari etnik atau kelompok rasnya dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi pentingnya.

Pada tahun 1922, sosiolog Max Weber, menulis tentang kelompok-kelompok etnik dengan cara baru, termasuk dalam lingkup definisi suatu elemen subjektif yang sebelumnya tidak ada. Weber juga membedakan antara ras dan identitas etnik dengan mengusulkan suatu hubungan darah adalah penting untuk identifikasi ras tetapi tidak untuk identifikasi etnik. Ia mendefinisikan kelompok-kelompok etnik sebagai, "...kelompok-kelompok manusia yang mempunyai suatu kepercayaan akan persamaan keturunan mereka karena kesamaan tipe fisik atau adat-istiadat atau kedua-duanya, atau karena ingatan-ingatan (*memories*) pada kolonisasi dan migrasi; kepercayaan ini sangat penting untuk pembentukan kelompok; lebih-lebih lagi tidak penting apakah suatu hubungan darah objektif ada." (http://www.ac.wvu.edu/~trimble/ethnicity_identity.htm)

Tampaknya pemimpin-pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia pada bagian pertama abad ke-20 menggunakan pemahaman ini. Meskipun berbagai macam identitas etnik terdapat di Indonesia, namun mereka mencoba meyakinkan para konstituen bahwa rakyat Indonesia menurut sejarahnya berasal dari satu keturunan yang sama dari daratan Asia Tenggara, mereka migrasi ke kepulauan dan karena persamaan nasib dijajah Belanda; maka muncul "mitos 350 tahun penjajahan Belanda."

Meskipun Weber menulis pentingnya etnisitas pada umumnya, ia tidak pernah merasa perlu para individu secara aktif berpartisipasi dalam pembentukan identitas etnik mereka, juga ia tidak menjelajah konsep itu lebih lanjut di luar suatu konseptualisasi definisi.

Konsep identitas etnik mulai muncul kembali dalam literatur ilmu-ilmu sosial dan perilaku tahun 1960an dan 1970an. Etnisitas, misalnya, saat sekarang lebih jelas daripada beberapa dekade sebelumnya. "Etnisitas," menurut sosiolog Daniel Bell, "adalah suatu cara (sekarang) bagi kelompok-kelompok yang tidak

beruntung (*disadvantages*) untuk mengklaim serangkaian hak-hak dan hak-hak istimewa (*privileges*) yang telah ditolak oleh struktur-struktur kekuasaan yang ada (Bell, 1975: 174). Dan selama beberapa dekade kelompok-kelompok minoritas etnik Amerika keturunan Afrika (*Afro-Americans*) telah secara aktif menegaskan hak-hak sipil (*civil rights*) dan menuntut hak-hak istimewa yang sampai saat ini menyangkal mereka. (http://www.ac.wvu.edu/~trimble/ethnicity_identity.htm)

Konsep ras rupanya mulai ditinggalkan digantikan dengan etnik saja. Misalnya, buku Banks, berjudul *Teaching Strategies For Ethnic Studies* (1987) tidak lagi menyebut ras melainkan “*ethnic*” untuk menyebut “*European Americans*,” “*Afro-Americans*,” “*Jewish Americans*,” “*Hispanic Americans*,” “*Asian Americans*.” Untuk *Asian Americans*, misalnya, di dalamnya ada etnik “*Chinese Americans*,” dan “*Indochines Americans*.” Tampaknya semua orang-orang Asia dimasukkan di bawah “payung” orang-orang Amerika keturunan Asia ini. Di Indonesia juga terdapat jutaan orang-orang Cina yang sudah tidak lagi diklasifikasikan sebagai “ras” melainkan disejajarkan dengan etnik-etnik di Indonesia lainnya seperti Jawa, Makassar, Bali, Papua dll.

3. Identitas Nasional

Bangsa (*nation*) adalah batasan sebuah bentuk komunitas kultural dan sosial. Di Eropa Barat dan belahan dunia Barat umumnya sejak akhir abad ke-18 orang-orang sudah berpendapat bahwa semua manusia dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok yang disebut bangsa. Kebangsaan (*nationhood*) adalah sebuah doktrin etika dan filosofis dan merupakan titik berangkat bagi ideologi dan nasionalisme. Anggota dari sebuah “bangsa” berbagi sama (*share*) dalam sebuah identitas yang serupa, biasanya asal-usul yang sama, dalam arti sejarah, keturunan, leluhur, orangtua atau keturunan. Sebuah bangsa meluas lintas generasi, sejak generasi masa lalu sampai ke generasi yang akan datang. (<http://en.wikipedia.org/wiki/Nation>)

Di Indonesia seperti sudah disinggung di atas, ketika para pendiri bangsa (*founding fathers*) mendirikan sebuah negara-bangsa tahun 1945, merasa yakin bahwa meskipun etnik (baca: suku) berbeda-beda tetapi berasal dari asal-usul leluhur yang sama, pengalaman kolektif sejarah yang sama (di bawah penjajahan

Belanda dan kemudian Jepang); karena merasa mempunyai masa lalu yang sama dan akan menghadapi masa akan datang yang sama.

Meskipun sebuah bangsa tidak identik dengan negara, tetapi rakyat dari sebuah negara-bangsa menganggap diri mereka sebuah bangsa. Walaupun secara tradisional monokultural, tetapi definisinya sendiri bisa multikultural. Istilah *bangsa* kerap kali disinonimkan dengan kelompok etnik (kadang-kadang “*ethnos*”). Hanya meskipun etnisitas sekarang adalah salah satu aspek terpenting dari identitas kultural atau identitas sosial, orang-orang dari asal etnik yang sama dapat hidup di negara-negara bangsa yang berbeda dan oleh karena itu diperlakukan sebagai anggota-anggota (warganegara) dari bangsa-bangsa yang terpisah. Identitas nasional acapkali diperdebatkan sampai kepada level individual. (<http://en.wikipedia.org/wiki/Nation>).

Hampir semua bangsa-bangsa dikaitkan dengan sebuah wilayah tertentu yang disebut tanahair (*homeland*). Sejumlah di antaranya hidup dalam suatu “diaspora historis” yaitu terutama di luar tanahairnya. Sebuah negara yang secara eksplisit menandai sebagai tanahairnya dari sebuah bangsa tertentu adalah sebuah negara-bangsa (*nation-state*), dan negara-negara paling modern termasuk dalam kategori ini, meskipun masih diperdebatkan dengan keras legitimitasnya. Di mana sebuah wilayah diperebutkan antara dua bangsa, klaimnya bisa jadi berdasarkan atas bangsa mana yang tinggal di situ pertama kali. Terutama di wilayah-wilayah pemukiman historis orang-orang Eropa (1500-1950), istilah “Bangsa-bangsa Pertama” (*First Nations*) digunakan oleh kelompok-kelompok yang memiliki bersama suatu budaya pribumi (*aboriginal culture*), dan mengusahakan pengakuan resmi atau otonomi. (<http://en.wikipedia.org/wiki/Nation>). Palestina, misalnya, orang-orang Arab dan Yahudi memperebutkan sebagai orang-orang yang paling pertama mendiami daerah itu.

Di Eropa terutama sejak akhir abad ke-18, ide “*nation*” (bangsa) memperoleh arti politik yang fundamental dengan munculnya ideologi dan filsafat nasionalisme. Para nasionalis melihat sebuah “*bangsa*” tidak semata-mata sebuah istilah deskriptif untuk sekelompok orang, tetapi sebuah entitas yang berhak atas

kedaulatan, jika perlu dengan menghancurkan negara-negara yang bukan-nasional. Tidak ada kesepakatan di antara teoritis-teoritis nasionalisme, mengenai apakah suatu faktor politik signifikan pada waktu itu. Sejarawan melihat Inggris dan Portugal sebagai negara-negara-bangsa awal dengan suatu rasa identitas nasional yang sudah berkembang. Tetapi sejarawan lain melihat negara-bangsa adalah kreasi abad ke-19, apakah itu hasil kampanye politik para nasionalis, atau sebagai kreasi dari atas ke bawah oleh negara-negara yang sudah ada sebelumnya. Abad ke-19 dianggap sebagai abad kemenangan nasionalisme setelah berturut-turut terbentuk negara-negara-bangsa Italia (1861) dan Jerman (1871); yang pertama bentukan dari atas dipelopori Piedmont dan yang kedua oleh Prusia. Akan tetapi teoritis modern seperti Benedict Anderson berpendapat bahwa bangsa-bangsa itu acapkali “komunitas-komunitas rekaan” (*imagined communities*) yang dibentuk melalui berbagai macam cara. (<http://en.wikipedia.org/wiki/Nation>)

Di Indonesia kesadaran berbangsa sudah mulai ada pada bagian pertama abad ke-20 dengan terbentuknya gerakan-gerakan nasional, baik sebagai organisasi sosial maupun sebagai partai politik; baik sebagai organisasi keagamaan (terutama Islam) maupun partai-partai nasionalis. Dalam kongres pemuda yang mencetuskan apa yang kemudian disebut “Sumpah Pemuda” bulan Oktober 1928--tampaknya seperti deklarasi kebudayaan pada hal sebenarnya politik berselubung--melahirkan tekad setia para pemuda untuk “bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; berbahasa persatuan, bahasa Indonesia.” Para pemuda itu merepresentasikan beberapa etnik besar di Indonesia (ketika itu masih disebut Hindia-Belanda) yang bertekad untuk menjadi sebuah bangsa yang satu di sebuah negara-bangsa yang masih menjadi cita-cita dan sedang diperjuangkan. Mereka adalah wakil-wakil “*Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond,*” dll. termasuk beberapa pemuda etnik Cina. (http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Pemuda) Pada kesempatan itu pula, Muhammad Yamin, mengemukakan ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Purnomowulan dan Sarmidi Mangunsarkoro, berpendapat bahwa anak

harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Buat pertama kali pada kesempatan itu diperdengarkan lagu "*Indonesia Raya*" karya Wage Rudolf Supratman. (["http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Pemuda"](http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Pemuda))

Dalam perjalanan waktu abad ke-20, sebagai akibat dari dekolonisasi, terutama setelah berakhir Perang Dunia II, muncul negara-negara-bangsa di kawasan Asia Selatan maupun di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia.

Istilah "negara-bangsa" digunakan bagi bangsa-bangsa di mana identitas yang sama berasal dari sebuah negara yang berbagi sama kewarganegaraannya (*shared citizenship*). Ini menyiratkan negara dibentuk lebih dahulu baru identitas nasional menyusul kemudian atau berjalan bersamaan. Dalam hal ini negara-bangsa Indonesia dibentuk bersamaan dengan "*nation and character building*." Proses ini sebenarnya masih terus berlangsung meskipun usia republik sudah 63 tahun.

Identitas nasional merujuk kepada bentuk-bentuk istimewa dari kelompok serta rasa memiliki (*sense of belonging*) dari individu-individu kepada kelompok itu. Satu kriteria yang luas digunakan dengan aplikasi-aplikasi yang berbeda-beda. Persyaratan pertama karakteristik-karakteristik itu harus ada rasa memiliki bersama (*shared*). Satu kelompok orang-orang yang tidak mempunyai kesamaan tidak bisa menjadi sebuah bangsa. Karena berbagi sama, rakyat nasional juga harus mempunyai tingkat uniformitas dan homogenitas. Persyaratan lain karakteristik itu harus eksklusif yaitu untuk membedakan bangsa itu dengan bangsa-bangsa tetangga. (<http://en.wikipedia.org/wiki/Nation>)

Seringkali dikatakan bahwa persamaan keturunan, persamaan bahasa, persamaan budaya, persamaan agama merupakan persyaratan bagi adanya sebuah negara-bangsa. Tetapi ini pun masih menjadi perdebatan. Dari aspek level mikro, Indonesia memiliki jumlah ratusan etnik yang hidup di atas ribuan pulau, menggunakan ratusan bahasa daerah (*vernaculars*), dan karena itu mendukung sejumlah ratusan budaya, serta memeluk berbagai agama besar atau kepercayaan lokal. Tetapi tidak semua kriteria berlaku di Indonesia. Pada level

makro nasional, misalnya, jika kriterianya agama, Indonesia mayoritas penduduknya Islam, dipeluk oleh berbagai kelompok etnik, akan tetapi agama Islam tidak menjadikan syarat untuk adanya sebuah bangsa. Begitu juga agama Kristen, Hindu atau Budha. Demikian pula jika kriterianya bahasa, bahasa daerah Jawa penuturnya adalah kelompok etnik terbesar, tetapi bahasa Jawa tidak digunakan sebagai bahasa persatuan. Jadi tampaknya perbedaan dapat membentuk persatuan, dan persatuan dapat terbentuk dari perbedaan. Keseimbangan yang cukup “halus dan sulit” (*delicate*) ini agar tetap dapat harmonis, salah satu caranya ialah melalui suatu pendidikan—meminjam istilah Athony Giddens--yang bersifat “dualitas” (*duality* bukan *dualism*), yaitu sambil mempertahankan, memperkenalkan, menghargai keragaman budaya yang positif ada, pada waktu yang sama membentuk sebuah budaya nasional sebagai perekat bangsa dalam sebuah negara-bangsa yang modern.

4. Perspektif Pendidikan Multikultural

James A. Banks (1995), pakar kunci dalam pendidikan multikultural mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai:

sebuah bidang kajian dan sebuah disiplin yang sedang muncul yang tujuan utamanya menciptakan peluang-peluang pendidikan yang sama untuk semua siswa dari berbagai ras, etnik, klas-sosial, dan kelompok-kelompok kultural. Salah satu dari tujuan utamanya ialah membantu semua siswa untuk memperoleh pengetahuan, sikap-sikap (*attitudes*), dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk berfungsi efektif dalam sebuah masyarakat demokratis yang pluralistik dan untuk berintegrasi, bernegosiasi, dan berkomunikasi yang maksudnya untuk kebaikan bersama.

Selanjutnya Banks menambahkan:

Pendidikan multikultural tidak hanya mengambil isi, konsep-konsep, paradigma-paradigma, dan teori-teori dari bidang-bidang interdisiplin yang terspesialisasi seperti kajian-kajian etnik dan kajian-kajian perempuan (dan dari sejarah dan sains-sains sosial dan *behavioral*), tetapi ia juga menginterogasi, menantang, dan menafsirkan kembali isi, konsep-konsep, dan paradigma-paradigma disiplin-disiplin yang telah mapan. Pendidikan multikultural menerapkan isi dari bidang-bidang dan disiplin-disiplin ini ke dalam pedagogi dan pengembangan kurikulum dalam *setting-setting pendidikan*. Hasilnya, kita dapat mendefinisikan pendidikan multikultural itu sebagai sebuah bidang kajian yang didesain guna meluaskan persamaan pendidikan untuk semua siswa yang

memasukkan di dalamnya, isi, konsep-konsep, prinsip-prinsip, teori-teori, dan paradigma-paradigma dari sejarah, sains-sains sosial dan behavioral, dan terutama kajian-kajian etnik dan kajian-kajian perempuan.”
(<http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/educatrs/presrvce/pe3lk1.htm>)

Mengajar dengan perspektif multikultural ini membuat anak-didik merasa kebudayaannya sendiri sebagai suatu ciri positif yang unik, serta juga mendorong anak-didik tersebut dapat mengapresiasi, memahami, dan menerima pula keunikan dari kebudayaan-kebudayaan lain. (Banks, 2003: <http://www.newhorizons.org>)

Tujuan dari pendidikan multikultural bukan hanya untuk mengajar anak-anak-didik tentang kelompok-kelompok dan negara-negara lain. Pendidikan ini juga membantu anak-anak didik tersebut menjadi terbiasa dengan ide bahwa ada sejumlah besar gaya-gaya-hidup, bahasa, budaya, dan sudut pandang yang berbeda dengan apa yang telah dikenalnya selama ini. Dengan demikian setiap anak merasa diajak serta dan dihargai, akan memiliki rasa bersahabat dan menghormati orang-orang dari etnik lain dan kebudayaan lain. (Banks, 2003: <http://www.newhorizons.org>)

Negara-negara bangsa yang demokratis menghadapi tantangan dalam mengelola pendidikan. Negara harus memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada semua warganegaranya yang terdiri atas beragam kelompok etnik, ras, bahasa daerah, agama serta kepercayaan sehingga mereka masih dapat mempertahankan aspek-aspek kebudayaan mereka, sambil pada waktu bersamaan negara juga membangun sebuah “*nation*” yang di dalamnya kelompok-kelompok beragam itu secara struktural menjadi bagian daripadanya dan menyatakan setia kepadanya. Dalam hal ini Banks dalam menggagas pendidikan multikultural menyadari betul betapa sulit (*delicate*) menyeimbangkan antara perbedaan (*diversity*) dan persatuan (*unity*). Tetapi betapapun juga itu menjadi tujuan esensial yang harus dilaksanakan oleh negara-negara-bangsa yang demokratis dalam pengajaran dan pembelajaran.

Masalah utama bagi negara-negara bangsa di seluruh dunia ialah bagaimana merefleksikan perbedaan-perbedaan ras, etnik, kultural dan agama di

dalam masyarakat-masyarakat mereka sambil mempertahankan kesatuan nasional. (Banks, 2003: <http://www.newhorizons.org>)

Hal ini juga yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Tidak persis seperti Amerika Serikat yang masih terus menghadapi imigran-imigran dari luar, Indonesia secara internal harus juga menghadapi masalah tidak kalah krusialnya. Proyek transmigrasi yang sebenarnya sudah diperkenalkan sejak jaman kolonial Belanda masih dilakukan setelah Indonesia merdeka dengan memindahkan sejumlah orang dari Jawa (juga ada dari Bali, Sunda, dll) yang padat penduduknya ke pulau-pulau lain. Ketika mereka mengangkut seluruh perangkat budaya mereka (termasuk agama yang mereka peluk), di tempat baru mereka harus berinteraksi dengan lingkungan dan tentu saja dengan etnik-etnik setempat. Selama mereka masih bisa beradaptasi, semuanya lancar-lancar saja. Tetapi ketika salah satu pihak memaksakan kehendak sebagaimana yang seringkali menjadi “stereotype” etnik-etnik tertentu, maka konflik bisa terjadi. Konflik-konflik horizontal antar-etnik (baca: suku) seperti yang pernah terjadi di Maluku, Sambas, Sampit, atau konflik-vertikal antara kelompok etnik terhadap pemerintah pusat seperti yang terjadi di Aceh dan Papua yang ingin melepaskan diri dari pemerintah nasional dan membentuk negara merdeka sendiri, adalah contoh-contoh bagaimana sulitnya mencari keseimbangan itu.

Peristiwa-peristiwa yang disebut SARA (suku, antara golongan, ras, dan agama), yaitu konflik antara etnik-etnik setempat dengan etnik (ras) Cina, konflik intra-suku sendiri tidak jarang terjadi, begitu pula antara golongan, antara partai-partai politik, antara pemeluk agama, bahkan ada pula intra-seagama. Ini semua contoh-contoh betapa pemerintah nasional harus menangani gejolak ketidakseimbangan itu untuk kembali ke ekuilibrium dan harmoni.

Di Amerika Serikat seperti yang ditulis oleh Banks, ideologi demokratis dari negara besar ini menghadapi kesenjangan yang lebar antara cita-cita (*ideals*) dan kenyataan-kenyataan (*realities*). Tantangan utama untuk menyeimbangkan perbedaan dan kesatuan semakin kuat ketika negara-bangsa yang demokratis itu penduduknya menjadi lebih beragam dan ketika kelompok-kelompok ras dan etnik di dalam negara itu mencoba dengan gerakan-gerakan mereka untuk memperoleh hak-hak kultural, sipil, politik, ekonomi dan pendidikan pada

tahun-tahun 1960an dan 1970an. Sejak tahun-tahun ini gagasan yang disusul dengan pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah-sekolah mulai dicobakan. Di Indonesia sendiri—tentu saja dengan alasan-alasan yang berbeda dari Amerika Serikat—telah mulai dibahas dalam seminar-seminar tahun-tahun 2004 dan 2005 oleh berbagai kalangan dan pakar. (Sunarto, eds. 2004; *International Seminar on Multicultural Education*, 2005)

Kembali ke contoh Amerika Serikat, misalnya, secara historis pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat semula menganut ideologi asimilasionis. Tujuannya ialah mendidik siswa-siswa sehingga mereka sesuai dengan konsepsi mitos Anglo-Saxon Protestan mengenai “warganegara yang baik” (*good citizen*). Kesesuaian dengan Anglo-Saxon sebagai arusbesar (*mainstream*) adalah tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Dalam pelaksanaannya ialah menghapus budaya-budaya dan bahasa-bahasa komunitas siswa-siswa dari kelompok-kelompok yang berbeda. Salah satu akibat dari konsepsi pendidikan kewarganegaraan asimilasionis ini adalah banyak siswa yang kehilangan identitas-identitas budaya, bahasa, dan etnik pertama mereka karena harus masuk ke dalam arusbesar budaya Anglo-Saxon. Sejumlah siswa-siswa menjadi terasing dari keluarga dan komunitas mereka sendiri. Pada gilirannya akibat lain ialah banyak siswa menjadi terasing juga secara sosial dan politik di dalam lingkungan budaya sipil nasional (*national civic culture*). (Banks, 2003: <http://www.newhorizons.org>)

Sehubungan dengan itu maka menurut Banks di dalam sebuah masyarakat demokratis yang berbeda, warganegara-warganegaranya harus sanggup mempertahankan keterikatan-keterikatan kepada komunitas-komunitas kultural mereka sambil juga berpartisipasi secara efektif di dalam berbagi budaya nasional. Oleh sebab itu ia menandakan,

Persatuan tanpa perbedaan mengakibatkan penindasan kultural dan hegemoni. Perbedaan tanpa persatuan menyebabkan terjadi Balkanisasi dan kehancuran negara-bangsa. Perbedaan dan persatuan harus hadir-bersama (*coexist*) dalam suatu keseimbangan yang “halus” (*delicate*) dalam sebuah negara-bangsa yang multikultural demokratis.

Banks juga menyadari bahwa untuk mencapai keseimbangan yang diperlukan antara perbedaan dan persatuan itu adalah sebuah proses dan ideal

yang terus berlangsung yang tidak akan pernah sepenuhnya tercapai sempurna. Maka, lanjut Banks:

Adalah esensial kedua pihak kelompok-kelompok arusbesar (*mainstream*) dan kelompok-kelompok masyarakat pinggiran (*marginal*) berpartisipasi dalam memformulasi tujuan-tujuan masyarakat yang berhubungan dengan perbedaan dan persatuan. Kedua kelompok harus juga berpartisipasi dalam tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Pertimbangan (*deliberation*) dan berbagi kuasa (*sharing of power*) oleh kelompok-kelompok arusbesar dan terpinggirkan adalah esensial bagi pembangunan dan pegekalan sebuah negara-bangsa yang adil, bermoral, dan ikutserta demokratis dalam sebuah masyarakat berbeda secara kultural. (Banks, 2003: <http://www.newhorizons.org>)

Meskipun bukan menjadi satu-satunya *panacea* (obat mujarab), pendidikan multikultural adalah salah satu terobosan.

6. Penutup

Pada lambang Indonesia Garuda terdapat semboyan atau *motto* yang berasal dari bahasa Jawa Kuno, “*Bhinneka Tunggal Ika*,” biasa diterjemahkan bebas “berbeda-beda tetapi tetap satu juga,” yang dalam bahasa Inggris umumnya diterjemahkan bebas pula “*Unity in Diversity*.”¹ Semboyan ini diambil dari kitab tua *Sutasoma* karya Mpu Tantular tentang toleransi agama Siwa-Budha di Majapahit pada abad ke-14. Kemudian semboyan itu secara nasional maknanya diangkat dan diperluas bukan hanya tentang “toleransi” beragama untuk semua pemeluk agama-agama yang ada di Indonesia sekarang, tetapi juga toleransi dalam interaksi kehidupan segala etnik, budaya, bahasa daerah, golongan dsb. yang ada di dalam wadah negara-bangsa Indonesia. Dalam hal ini pemeluk-pemeluk Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia menerimanya sebagai wujud toleransinya tanpa lagi mempersoalkan lagi asal-usul *motto* tersebut. Ini salah satu pembelajaran multikultural, selain sebagai konsekuensi menjadi salah satu komponen dari rakyat sebuah negara-bangsa, menerima semboyan itu tanpa mengorbankan akidah.

¹ Hampir serupa, sejak tahun 1776, Amerika Serikat telah menggunakan motto dari bahasa Latin “*E Pluribus Unum*” yang artinya “*Out of many, one*.” (<http://www.greatseal.com/mottoes/unum.html>).

Rupanya para pendiri bangsa Indonesia pada tahun 1945 secara visioner-profetik telah menatap ke masa depan, dengan berangkat dari masa lalu (sejarah) dalam sebuah negara modern, rakyat/warganegaranya tidak lagi tunggal etnik (monoetnik) dengan satu budaya (monokultural) melainkan berasal dari berbagai kelompok etnik yang masing-masing memiliki budaya, bahasa daerah, adat-istiadat, kepercayaan, dan agama sendiri-sendiri (multietnik-multikultural). Adalah realitas bahwa ada etnik yang jumlahnya terbesar yang mempunyai dan menggunakan bahasa daerah sendiri, tetapi ada pula etnik dalam jumlah terkecil, hidup dalam komunitas-komunitas tersendiri dan terasing dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Meskipun demikian secara resmi tidak dikenal budaya *mainstream* atau *subordinatestream* hanya karena jumlah; semuanya mendapat perlakuan yang sama, termasuk hak-hak untuk mendapat pendidikan. Indonesia beruntung karena mempunyai bahasa nasional Indonesia yang “embrionya” dari bahasa Melayu sebagai *lingua franca*, bukan bahasa Jawa yang etniknya mayoritas terbesar. Tentu saja tidak cukup dengan semboyan saja. Persamaan dalam memperoleh *pendidikan* untuk semua kelompok etnik adalah salah satu cara untuk bisa “berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” sebagai satu bangsa. Bagi Indonesia “*nation and character building*” masih terus berlanjut dengan segala macam rintangan dalam perjalanannya.

Referensi:

- Banks, James A. (2003). “Educating Global Citizens in a Diverse World,” dalam *New Horizons for Learning*. (<http://www.newhorizons.org>).
- Banks, James A. (1987). *Teaching Strategies For Ethnic Studies*. 4th.ed. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Barth, F. (1969). *Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference*. Boston: Little, Brown, & Co.
- Bell, D. (1975). *Ethnicity and social change*. In N. Glazer & D. P. Moynihan, (Eds.), *Ethnicity: Theory and practice* (pp. 174n), Cambridge: Harvard University Press.
- Blij, H.J. de & Muller, Peter O. (2004). *Geography. Realms, Regions, and Concepts*. 11th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.

- Cheung, Y. W. (1993). "Approaches to ethnicity: Clearing roadblocks in the study of ethnicity and substance abuse." *International Journal of Addictions*, 28(12), 1209-1226.
- Constant, Amelie; Gataullina, Liliya; Zimmermann, Klaus F; *et.al.* (2006). "Gender, Ethnic Identity and Work," *Forschungsinstitut Zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor*. IZA Discussin Paper No. 2420. November.
- Eriksen, Thomas Hylland. (2001). "Ethnic identity, national identity and intergroup conflict: the significance of personal experiences," dalam Ashmore, Jussim, Wilder (eds.). *Social identity, intergroup conflict, and conflict reduction*, pp. 42-70. Oxford: Oxford University Press. (http://folk.uio.no/geirthe/Identity_politics.html).
- Hanley, Mary Stone. "The Scope of Multicultural Education." dalam *New Horizons for Learning*. (<http://www.newhorizons.org>).
- International Seminar on Multicultural Education: Cross-Cultural Understanding For Democracy and Justice*. Seminar Proceeding. Yogyakarta: August 26-28, 2005.
- Phinney, J. (2003). "Ethnic identity and acculturation." In K. Chun, P. B. Organista, & G. Marin (Eds.), *Acculturation: Advances in theory, measurement, and applied research* (pp.63- 81). Washington, DC: American Psychological Association.
- Saharso, S. (1989). "Ethnic identity and the paradox of equality." In J. P. Van Oudenhoven & T. M. Willemsen (Eds.), *Ethnic minorities: Social psychological perspectives* (pp. 97-114). Berwyn, PA: Swets North America.
- Simpson, J. A., & Weiner, E. S. (1989). *The Oxford English dictionary* (2nd ed., Vol. VII). Oxford: Clarendon Press.
- Sollars, W. (1996), *Theories of ethnicity: A classical reader*. New York: New York University Press.
- Sunarto, Kamanto, *et.al.* eds. (2004). *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping into the Unfamiliar*. Depok: Jurnal Antropologi Indonesia.
- Tiedt, Pamela . & Tiedt, Iris M. (1990). *Multicultural Teaching*. 3rd edition. Boston: Allyn and Bacon.
- Trimble, Joseph E. and Dickson, Ryan. "Ethnic Identity," dalam C. B. Fisher & Lerner, R. M. (Eds.; in press), *Applied developmental science: An*

encyclopedia of research, policies, and programs. Thousand Oaks: Sage.
(http://www.ac.wvu.edu/~trimble/ethnicity_identity.htm).

Weinreich, P., & Saunderson, W. (Eds.). (2003). *Analyzing identity: Cross-cultural, societal and clinical contexts*. New York: Routledge.

(http://folk.uio.no/geirthe/Identity_politics.html).

(http://www.ac.wvu.edu/~trimble/ethnicity_identity.htm).

(<http://www.newhorizons.org>).

(http://www.uky.edu/Classes/FAM/357/fam544/ethnic_identity.htm),

http://id.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Pemuda

<http://www.greatseal.com/mottoes/unum.html>

( http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_group;

<http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/educatrs/presrvce/pe3lk1.htm>

Bandung, 11 Februari 2008